

BAB V

KEHIDUPAN BURUH PABRIK: MASALAH DAN PEMECAHAN DALAM KERANGKA EMPIRIS

A. Realitas Kehidupan Buruh Pabrik

1. Latar Belakang Identitas Pribadi

Latar belakang identitas pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini, antara lain meliputi asal daerah, usia dan jenis kelamin, status masing-masing individu, pendidikan, pengalaman organisasi, keadaan keluarga, dan jangka waktu mereka menjadi pekerja buruh pabrik. Adapun upaya memahami latar belakang identitas pribadi secara komprehensif dimaksudkan untuk memudahkan peneliti menemukan dan memilih solusi terbaik dan paling kecil risikonya dalam rangka memberikan bantuan untuk mengatasi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang begitu kompleks dan heterogen yang dialami oleh buruh pabrik itu sendiri.

Dari data yang diperoleh di lapangan, diketahui bahwa mayoritas buruh pabrik yang termasuk dalam wilayah sampel penelitian ini berasal dari daerah Jawa Timur sendiri, terutama Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan Gresik. Ada juga yang berasal dari luar keempat daerah ini, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Kenyataan ini menyebabkan para buruh tersebut merasa kesulitan untuk menjangkau secara langsung, pulang-pergi, ke lokasi pabrik di mana mereka bekerja, karena begitu jauhnya jarak

antara tempat asal (rumah) mereka dan lokasi pabrik. Kesulitan ini semakin dirasakan oleh buruh bila mereka dihadapkan pada realitas padatnya jam kerja dan ketatnya aturan yang dibuat oleh pabrik itu sendiri. Dengan demikian, alternatif yang bisa dilakukan oleh setiap buruh pabrik tersebut adalah mencari tempat yang terdekat dengan lokasi pabrik, apakah mereka memilih tinggal dengan jalan indekos atau tinggal di pesantren yang dekat dengan tempat mereka bekerja. Kenyataan bahwa mereka harus tinggal di sekitar kawasan pabrik menjadi masalah tersendiri bagi para buruh tersebut, baik dari segi ekonomi, sosial, psikologis, dan sebagainya. Yang demikian itu wajar, mengingat setiap orang yang berada di suatu lingkungan baru, senantiasa membutuhkan pengadaptasian diri dalam segala situasi dan kondisi.

Dilihat dari sudut usia dan jenis kelamin, responden yang terjaring dan paling besar adalah dari kelompok usia 21-25 tahun (58,5%). Secara konkret dapat digambarkan bahwa dari 400 responden, sebanyak 234 orang berusia antara 21-25 tahun, sedang 41,5% lainnya menyebar ke dalam kisaran usia 19-40 tahun. Usia 21-25 tahun tergolong usia produktif. Dari segi ekonomi, jenjang usia ini sangat menguntungkan dalam rangka peningkatan produktivitas kerja, baik dari pihak pekerja sendiri maupun dari pihak pengusaha pabrik. Sementara itu, dari segi jenis kelamin, dari 400 responden tersebut, terdapat 75% laki-laki dan 25% sisanya perempuan. Dari mayoritas laki-laki tersebut, kebanyakan dari mereka belum menikah. Perbedaan yang cukup tajam dari jenis kelamin responden ini, salah satunya disebabkan oleh sikap kaum perempuan pada umumnya yang lebih suka tetap bekerja di desa membantu orang tua daripada bekerja di kota yang dirasa sangat rawan dengan berbagai macam persoalan.

Secara psikologis, usia-usia produktif di atas, yakni 21-25 tahun merupakan masa-masa kritis karena menjadi puncak dari masa pubertas. Salah satu indikasinya adalah semakin kuatnya

keinginan mereka untuk mencintai lawan jenisnya. Di samping itu, timbulnya gejala psikis yang ingin bebas dan cenderung tidak mau diatur mulai tampak pada diri mereka. Usia tersebut bisa dikatakan masa pancaroba dari pubertas dan remaja menuju masa dewasa, yang tentu saja, sangat rawan terhadap munculnya persoalan-persoalan baru yang berkaitan dengan anak remaja, di antaranya adalah perilaku sosial yang menyimpang. Stabilitas emosi mereka tidak dalam keadaan yang mantap. Akibatnya, kontrol sosial seringkali mereka abaikan. Secara sosial, perilaku menyimpang di atas adalah suatu hal yang sangat memungkinkan sebagai penyebab bertambahnya masalah-masalah yang dihadapi oleh buruh pabrik. Yang demikian itu logis karena terjadinya kontak sosial di antara mereka yang begitu bebas dan tergantung kemauan mereka sendiri.

Mengenai lamanya mereka bekerja di pabrik juga sangat bervariasi; ada yang baru bekerja sekitar 1-5 tahun, 6-10 tahun, bahkan ada yang sudah mencapai antara 11-15 tahun, walaupun jumlahnya sangat kecil. Dari data yang terjaring diketahui bahwa yang masa bekerjanya berkisar antara 1-5 tahun adalah 326 responden (81,5%), suatu jumlah yang relatif besar, jika dibanding dengan jumlah responden yang hanya 400 orang, sedangkan 6-10 sebanyak 52 orang (13%) dan yang sudah mencapai 11-15 tahun hanya 22 orang (5,5%) saja. Dari data ini diketahui bahwa kebanyakan di antara mereka tidak ingin bekerja selamanya atau dalam jangka waktu yang lama di sebuah pabrik. Bahkan ada di antaranya yang meski baru menjadi buruh pabrik, berkemauan untuk meninggalkan pekerjaan di pabrik jika menemukan pekerjaan di luar pabrik yang lebih menjanjikan bagi masa depannya.

Meski demikian, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di luar pabrik itu juga tidak mudah dilakukan. Hal tersebut lebih disebabkan oleh keadaan dan kondisi dari masing-masing buruh itu sendiri. Kebanyakan mereka berasal dari lingkungan

keluarga petani dan pekerja kasar yang pada umumnya tergolong sebagai masyarakat kelas bawah yang notabene masyarakat miskin dan tidak berkecukupan secara ekonomi. Di samping itu, faktor pendidikan yang tidak terlalu tinggi, kurangnya *skill* atau keterampilan pada mereka sangat berpengaruh terhadap pekerjaan dan posisi yang didapatkan di tempat mereka bekerja. Yang demikian itu, bisa dibuktikan dari hasil penelitian di lapangan yang menunjukkan bahwa dari 400 responden, ternyata hanya 30 responden saja yang lulusan perguruan tinggi, yakni 7,5% saja dari jumlah yang begitu banyak. Selebihnya, yang berpendidikan dasar sebanyak 50 orang atau 12,5%, sekolah lanjutan pertama berjumlah 70 orang atau 17,5%, dan yang berasal dari sekolah menengah umum sebanyak 250 orang atau 62,5%.

Adapun mengenai tempat di mana mereka mempelajari ilmu agama juga beragam. Dari 400 responden, dapatlah diketahui bahwa yang belajar agama di sekolah umum berjumlah 104 responden (26%), sedang yang di madrasah sebanyak 54 orang (13,5%), di pondok pesantren 36 orang (9%), di rumah sendiri dan orang lain 46 orang (11,5%), dan yang belajar agama di mushalla atau masjid berjumlah 160 orang (40%). Dari data yang diperoleh, ternyata yang menempati urutan pertama adalah belajar agama di mushalla atau masjid, suatu tempat yang tidak formal, kurang terorganisir dengan baik, kurang mendapatkan perhatian orang tua, materinya tidak tersusun secara baik, ditambah menonjolnya unsur keikhlasan (*lillahi ta'ala*) bagi guru-guru yang mengajar dan sebagainya. Tingkat keikhlasan itu dapat diukur dari keberlangsungan pembinaan yang sangat tergantung pada ustadz atau guru yang secara suka rela mau meluangkan waktu untuk mengajarkan agama pada mereka. Karena itu, wajarlah jika pengetahuan keagamaan mereka relatif rendah. Nah, setelah mereka berada di kota, yakni di lingkungan industri yang sarat dengan berbagai macam persoalan, maka sangatlah tidak memadai ilmu agama yang

diperoleh tersebut dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di kemudian hari. Yang demikian itu, tentu saja, sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk memecahkan segala problem yang mungkin terjadi dan dialami oleh mereka.

2. Motivasi Pemilihan Kerja di Pabrik

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa mayoritas buruh pabrik itu adalah berasal dari keluarga petani, pekerja kasar, berpendidikan rendah, ditambah adanya pengetahuan agama yang minim serta kondisi ekonomi yang serba pas-pasan. Dengan kata lain, mereka tergolong masyarakat yang ekonominya lemah. Maka dari itu, wajarlah jika pemilihan kerja di pabrik itu, bagi mereka lebih banyak didorong faktor ekonomi. Mereka ingin meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dengan bekerja sebagai buruh pabrik. Ketika mereka ditanya tentang kepindahannya selalu saja prospek ekonomi perkotaan yang lebih menjanjikan menjadi alasan. Pentingnya pertimbangan-pertimbangan ekonomi dalam pengambilan keputusan itu tampaknya menjadi kenyataan yang universal. Tentu saja bagi masyarakat miskin, berbuat sebaliknya akan mengancam kelangsungan hidup mereka. Dari jumlah 400 orang, hampir 90% di antara mereka yang memilih faktor ekonomi (kemiskinan) sebagai dasar dan alasan mengapa harus kerja di pabrik, yakni sebanyak 370 orang. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh kondisi psikologis seperti adanya tekanan batin dari keluarga di rumah sehingga mencari kompensasi atau semacam pelarian di kota. Sebagian yang lain ada juga yang bekerja di pabrik untuk semata-mata karena ingin menikmati kehidupan baru yang lebih bebas, maju, dan modern.

Data di atas memberikan gambaran kepada kita, betapa besarnya faktor ekonomi itu sangat berpengaruh terhadap pola berpikir dan perilaku manusia dalam rangka mengubah kehidupannya agar menjadi lebih baik daripada kehidupan semula. Seiring dengan

proses industrialisasi di kota yang ditandai dengan semakin pesatnya pabrik-pabrik atau proyek-proyek industri, maka terjadi pula arus migrasi atau urbanisasi penduduk pedesaan. Migrasi atau urbanisasi tersebut dilakukan dengan berbondong-bondong sehingga terjadi penumpukan sumber daya manusia pedesaan di kantong-kantong sekitar kawasan industri (perkotaan). Dengan demikian, muncullah kantong-kantong masyarakat pedesaan di kota-kota besar. Di kota inilah masyarakat imigran lapisan bawah umumnya mengejar kesempatan kerja di pabrik-pabrik. Di pabrik-pabrik tersebut, mereka tidak sepenuhnya terserap sebagai tenaga kerja, padahal jumlah mereka yang datang ke sektor-sektor industri semakin lama semakin besar. Hal ini pada akhirnya semakin membebani ketenagakerjaan atau perburuhan di sektor industri, disebabkan banyaknya tenaga kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang ada. Akibatnya, daya tawar mereka sangat rendah di hadapan pemilik institusi-institusi industrial tersebut.

Selain itu, keinginan mereka untuk bekerja sebagai buruh di perkotaan, juga dipengaruhi oleh anggota kelompok seperti keluarga, komunitas lokal, dan teman sejawat yang mengembangkan pola perilaku yang dimodifikasi setiap waktu sebagai pengalaman yang menentukan dan menggembirakan bagi perbaikan taraf hidupnya. Pada umumnya mereka telah lama berada di perkotaan dan suatu saat pulang ke kampung halamannya kemudian menceritakan pengalaman tersebut kepada keluarga, kerabat dekat, dan teman-teman sekampung. Dengan demikian, mereka sudah mempunyai gambaran dan bayangan tentang keadaan kota dan kehidupan buruh pabrik sebelum mengambil keputusan. Pada saat memutuskan untuk bekerja ke kota, seringkali mereka memperoleh bantuan dari kerabat atau teman sekampung yang sudah mapan di kota.¹

¹ Bandingkan dengan hasil penelitian yang sama yang pernah dilakukan oleh Alan Gilbert & Joseph Gugler: "Para pekerja kerah putih dan kerah biru yang pindah

Model hubungan kekeluargaan seperti itu, biasanya merupakan elemen pokok dalam jalinan kerja seperti ini dan merupakan suatu perilaku yang bisa diterima oleh masyarakat pedesaan pada umumnya. Bahkan, kiriman uang para pekerja buruh pabrik ini seringkali mewarnai kehidupan orang-orang desa dan sering pula dianggap sebagai suatu yang istimewa. Karena hal inilah sehingga banyak yang berasumsi bahwa bekerja sebagai buruh pabrik adalah suatu yang berkonotasi positif. Dari hasil angket diketahui bahwa kebanyakan mereka yang bekerja di pabrik, sebagian uangnya disisihkan untuk membantu keluarganya yang ada di desa.

Memang diakui bahwa tidak selamanya motif uang menjadi motif primer bagi buruh pabrik. Dari angket yang disebarakan kepada responden, ditemukan adanya sebagian buruh pabrik yang mendapatkan bayaran lebih tinggi di tempat baru, namun minta bekerja kembali di tempat lama walaupun ia menerima gaji lebih sedikit. Disinyalir bahwa buruh yang demikian ini lebih menyukai pekerjaan tertentu, meskipun dengan gaji yang tidak terlalu banyak. Karenanya, kebanggaan, kecintaan, interes, dan minat yang besar terhadap pekerjaan menjadi insentif kuat untuk menyukai suatu pekerjaan. Dan pengangguran, dianggap sebagai kerugian atau kenistaan, lagi pula tuna kerja itu memutuskan mata rantai di antara diri sendiri dengan masyarakatnya.

Walaupun demikian, keterpaksaan secara ekonomi, tetap menjadi pemicu utama untuk tetap bisa bekerja di pabrik dan hampir setiap responden menjawab bahwa bekerja sebagai buruh

ke Bombay ternyata lebih dari tiga perempat mempunyai satu atau lebih keluarga yang sudah tinggal di kota tersebut. Lebih dari separuh menjadikan hal ini sebagai pertimbangan penting untuk datang ke Bombay. Sembilan dari sepuluh yang tercatat menyatakan bahwa mereka dibantu oleh keluarga atau teman-teman pada saat kedatangan: Kira-kira dua pertiga menerima akomodasi dan makanan gratis dan dua pertiga mereka mengakui dibantu untuk mendapatkan pekerjaan. Alan Gilbert & Josef Gulger, *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia ke Tiga*, terj. Juanda Anshari (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), hlm. 63.

pabrik itu adalah untuk bisa tetap hidup dan syukur-syukur jika bisa mengangkat harga diri dan keluarga. Yang demikian itu terjadi, karena adanya beberapa faktor, di antaranya adalah pembangunan pertanian di pedesaan sudah tidak menjanjikan lagi bagi mereka untuk bisa memperbaiki taraf hidupnya, akibat penggunaan teknologi dan akses kredit pertanian yang tidak merata. Selain itu, juga terdapat faktor industrialisasi itu sendiri yang senantiasa diasumsikan dapat memfasilitasi tercapainya kebutuhan hidup dengan cara yang lebih mudah dan cepat, dan secara ekonomi, pendapatan yang mereka peroleh sebagai konsekuensi dari keterlibatan mereka bekerja di sektor industri jauh lebih besar dengan risiko kerugian yang jauh lebih kecil dibanding dengan terlibat dalam aktivitas pertanian yang dikelola di pedesaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa urbanisasi itu terjadi seiring dengan terjadinya pergeseran struktur mata pencaharian penduduk dari sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa.

Dari keadaan tersebut, persoalan-persoalan yang menimpa kaum pekerja (buruh pabrik) dewasa ini dalam perspektif sosio-ekonomi pada umumnya meliputi beberapa hal. *Pertama*, jumlah jam kerja yang tinggi. *Kedua*, upah yang rendah dibarengi dengan jam kerja dan kedisiplinan yang tinggi. *Ketiga*, kurangnya jaminan keamanan dan keselamatan kerja.

Dalam kaitannya dengan problema buruh pabrik di atas, dapat dikatakan bahwa masalah perburuhan merupakan persoalan yang sangat krusial dan sarat konflik. Kaum buruh tidak jarang menjadi kuda tunggangan untuk mencapai suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Buruh ibarat sapi perah yang selalu diperas dan dipacu dengan tuntutan-tuntutan yang tinggi dari pemilik modal dan atau pengambil kebijakan yang berkolaborasi dengan pemilik modal. Persoalan yang mesti dimintakan pertanggungjawaban kepada buruh, dan ini yang selalu menjadi tuntutan buta pemilik modal,

adalah produktivitas, selama buruh masih mampu menjual atau mengeluarkan tenaganya demi produktivitas, apapun caranya.²

Yang perlu disadari bersama adalah bahwa persoalan buruh pabrik, sebagaimana data yang diperoleh di atas, ternyata tidak sebatas persoalan ekonomi semata, namun ada persoalan lain yang bersentuhan dengan kondisi psikologis dan mental-spiritual sesuai dengan keberadaannya sebagai manusia dengan segala kebutuhannya. Oleh karena itu, untuk mengetahui dan mendalami persoalan-persoalan buruh seperti dimaksud penelitian ini, upaya-upaya pembahasan mesti dilakukan dengan memerinci masalah-masalah sehari-hari yang mereka alami selama menjadi buruh pabrik, keberadaan mereka di tengah industrialisasi, serta akibat lebih lanjut bagi kehidupan buruh pabrik.

3. Rincian Masalah Sehari-hari

Masalah sehari-hari yang dialami oleh buruh pabrik ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Masalah ekonomi

Mereka pada awalnya beranggapan bahwa dengan bekerja sebagai buruh pabrik, akan terjadi perubahan yang mendasar secara ekonomi. Anggapan ini berbeda sama sekali dengan realitas setelah mereka terlibat langsung dan berstatus sebagai buruh pabrik. Ternyata, perubahan ekonomi yang mereka harapkan ke arah yang lebih baik tidak terlalu menunjukkan grafik yang tinggi.

² Bandingkan dengan SR. Parker, RK Brown, J. Child dan MA. Smith yang menjelaskan bahwa: "... Pertumbuhan ekonomi seperti halnya dengan "keuntungan maksimum mungkin" telah lama dianggap sebagai suatu nilai utama di dalam suatu sistem sosial dan ekonomi. Suatu tinjauan yang dikemukakan oleh Mishan (1969) dan sejumlah ahli lainnya menyatakan bahwa usaha keras untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya ternyata sering tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan karyawan (masyarakat) secara seimbang". SR. Parker, RK. Brown, J. Child dan MA. Smith, *Sosiologi Industri*, terj. G. Kartasapoetra (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 33.

Hal itu terjadi, karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya sebagaimana berikut:

Pertama, sebagian besar di antara mereka yang dapat diserap oleh industri berteknologi tinggi hanyalah tenaga-tenaga atau buruh kasar. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan buruh yang rata-rata tamat SLTP dan SLTA sehingga upah atau gaji yang didapatkan relatif rendah, sementara kehidupan di kota cenderung menuntut *cost* (biaya) hidup yang tinggi. Berbicara tentang upah atau gaji, sebenarnya sudah ada ketentuan baku dari pemerintah tentang standar Upah Minimum Regional (UMR). Namun demikian, pihak perusahaan lebih cenderung memenuhi batas minimalnya. Sementara di sisi lain, dalam kondisi krisis semacam ini, berapa pun upah yang diberikan oleh pabrik akibat daya tawar mereka yang lemah mengakibatkan pihak buruh cenderung akan menerima secara apa adanya. Jumlah yang kecil ini jelas akan bertentangan dengan tingkat kebutuhan mereka yang sangat tinggi di tengah ketidakpastian harga kebutuhan pokok.

Dari data yang diperoleh di lapangan, yakni Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan Gresik, tampak bahwa upah atau gaji buruh pabrik bervariasi antara Rp100.00,00–Rp300.000,00 dan lebih dari Rp300.000,00 dalam setiap bulannya. Secara konkret dapat dikatakan bahwa dari 400 responden yang menerima upah antara Rp100.00,00–Rp300.000,00 sejumlah 310 orang atau 77,5%, sedang yang sudah mencapai lebih dari Rp300.000,00 hanya 90 orang atau 22,5%. Selanjutnya, rincian data mengenai upah buruh pabrik dapat dilihat dalam tabel berikut:

Variasi Upah Buruh pabrik

	Kotamadya/ Kabupaten	Besarnya Upah			
		<100.000,00	100.000,00 - 200.000,00	200.000,00 - 300.000,00	>300.000,00
1.	Surabaya	-	4	14	5
2.	Sidoarjo	-	13	25	8
3.	Mojokerto	-	-	5	1
4.	Gresik	-	19	16	-
	Jumlah	0	36	60	14

Kedua, beban hidup mereka bertambah karena tempat tinggal yang dihuni bukanlah milik sendiri, melainkan milik orang lain yang harus disewa atau dikontrak sesuai dengan kesepakatan. Memang, kebutuhan terhadap tempat tinggal yang layak huni dan terjangkau merupakan dambaan bagi setiap buruh pabrik. Namun demikian, karena sangat minimnya gaji atau upah yang mereka terima tiap bulannya, mereka hanya mampu menyewa kamar yang sempit dan cenderung kurang layak. Meski demikian, ada sebagian dari mereka yang kemudian mencari kos-kosan yang agak nyaman, murah tetapi jauh dari lingkungan kerja mereka di pabrik, dengan risiko transportasi yang agak mahal dan kemungkinan keterlambatan masuk kerja tepat waktu. Kos-kosan semacam ini biasanya diperoleh di daerah-daerah pinggiran atau pedesaan yang sudah agak jauh dari sentra kehidupan ekonomi di kota dan pusat industri.

Dari data yang diperoleh, kebanyakan mereka lebih suka memilih kos-kosan yang dekat dengan lokasi pabrik, meskipun tempatnya agak kumuh dan kurang memenuhi standar sanitasi. Sejumlah 330 orang dari 400 responden (82,5%) memiliki kos-kosan yang dekat pabrik, sedangkan yang memilih kos-kosan yang jauh dari lokasi pabrik, tapi mereka dengan kos-kosan bagus sebanyak 70 orang (7,5%) saja.

Ketiga, alat transportasi yang digunakan, pada umumnya, adalah angkutan umum, di mana setiap harinya masing-masing

buruh itu harus menyediakan dana untuk transportasi minimal Rp3000.00 sampai dengan Rp4000.00. Hal ini terjadi bagi mereka yang memang tinggal di kos-kosan yang jauh dari lokasi pabrik dan sulit dijangkau dengan transportasi biasa.

Dari semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut, jika dikalkulasi dalam jangka waktu satu bulan, nominalnya sangat besar dan akan terus mengurangi pendapatan para buruh itu sendiri. Akibatnya, walaupun mereka sudah bertahun-tahun bekerja sebagai buruh pabrik, tetap saja mereka hidup dan berstatus ekonomi lemah karena hasil yang diperoleh selalu pas-pasan dan bahkan seringkali tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, apalagi untuk menabung demi masa depannya.

Di samping itu, ada kecenderungan bahwa pembangunan industri di suatu kawasan seringkali memicu kenaikan harga barang dan kebutuhan sehari-hari. Hal ini bisa dilihat dari reaksi para pedagang yang berjualan di sekitar kawasan industri tersebut. Mereka cenderung menaikkan harga barang karena tahu bahwa buruh-buruh pabrik itu sangat membutuhkan barang-barang yang dijual dan lokasinya tidak jauh dari lokasi industri di mana mereka bekerja. Dalam keadaan seperti ini pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari meningkat, sedangkan penghasilan tidak sesuai dengan pengeluaran. Alhasil, kehidupan para pekerja buruh pabrik itu tidak mengalami perubahan yang berarti meskipun ada kenaikan gaji atau penghasilan.

Untuk mengatasi beberapa persoalan ekonomi tersebut, banyak buruh pabrik yang cenderung menambah jam kerjanya (lembur). Hal ini setidaknya dilatarbelakangi baik oleh tuntutan pengelola pabrik untuk memenuhi kapasitas produksi, juga oleh keinginan buruh pabrik sendiri untuk menambah penghasilannya. Semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk lembur, secara

otomatis jumlah uang yang diterimanya akan lebih besar. Namun demikian, juga berakibat semakin hilangnya kesempatan istirahat, rekreasi, dan sebagainya.

b. Masalah sosial

Persoalan yang berkaitan dengan pergaulan dan hubungan yang dialami oleh buruh pabrik, setidaknya bisa digambarkan melalui pola sebagai berikut. *Pertama*, hubungan sosial buruh yang didasarkan pada kesamaan daerah. *Kedua*, hubungan sosial buruh antar etnis yang satu dengan etnis yang berbeda. *Ketiga*, hubungan antara buruh dengan masyarakat luas, yakni masyarakat kota yang berkebudayaan maju dan modern.

Masyarakat kota, sebelum datangnya industri dan berdirinya pabrik-pabrik besar di lingkungan mereka berada, merupakan bentuk masyarakat yang punya hubungan kekerabatan antara satu sama lain. Hal ini ditandai dengan adanya sikap tolong-menolong dan gotong royong yang sudah menjadi ciri khas dalam setiap kegiatan di antara sesama warga. Namun demikian, dengan hadirnya industri tersebut, lambat laun terjadi perubahan besar dalam corak dan kebudayaan masyarakat.

Masyarakat yang mula-mula relatif tertutup menjadi semakin terbuka. Di kalangan mereka juga terjadi pergeseran mata pencaharian. Mereka yang dahulu hidup sebagai petani, sekarang menjadi buruh kasar di pabrik, pedagang kaki lima dan pekerjaan-pekerjaan informal lainnya. Di samping itu, masyarakat yang semula relatif bercorak komunal menjadi semakin individualistik. Ikatan solidaritas kelompok masyarakat agraris seperti gotong royong, bekerja sama tanpa upah atau tukar menukar tenaga, berubah menjadi masyarakat yang bercorak individualistik yang mendasarkan hubungan antar mereka pada kepentingan ekonomi (material). Ikatan solidaritas sosial yang bercorak komunal pada masyarakat pertanian seringkali didasarkan atas kekerabatan atau

kedekatan tempat tinggal, sedangkan solidaritas sosial pada masyarakat yang bercorak individualistik dalam masyarakat industri didasarkan atas kesamaan tempat kerja dan profesi.

Di samping itu, hadirnya teknologi industri memberikan pengaruh yang kuat terhadap perubahan sistem keluarga sebagai unit sosial. Sebagaimana diketahui bahwa keluarga dalam masyarakat agrikultural atau pertanian tidak hanya merupakan unit biologis saja, akan tetapi juga merupakan unit produksi, di mana anak-anak dan istri merupakan modal sosial yang harus ikut memproduksi dan ikut mencari penghasilan. Sekarang ini, akibat pengaruh industri, anak-anak dan istri tidak lagi menjadi modal ekonomis, tetapi justru menjadi beban tanggungan dan beban ekonomis. Rumah dan keluarga tidak lagi menjadi fokus sentral dari masyarakat modern. Anak-anak, istri dan suami jarang saling bertemu dan berkomunikasi, karena masing-masing mempunyai dunia kesibukan dan interesnya sendiri-sendiri, lebih-lebih sebagai buruh pabrik yang harus tunduk pada aturan yang amat ketat.

Oleh karena itu, perkembangan industri dengan semakin tingginya teknologi produksi massal itu, merongrong keutuhan keluarga. Keluarga yang semula merupakan satu unit yang utuh, kompak, dan intim, kemudian menjadi berantakan. Menjadi otomistis sifatnya, di mana masing-masing anggotanya beroperasi dengan cara, irama, serta tempo yang berbeda, sehingga mereka jarang melakukan kontak secara psikis dan fisik. Hilanglah keutuhan keluarga dan hilang pula intimitas familiarnya. Masyarakat dan kebudayaan manusia menjadi tidak berdaya terhadap pengaruh industri dan kekuasaan teknologi baru, sebab tidak lagi mempunyai landasan dasar berupa nilai-nilai dan norma-norma yang kokoh guna membantali goncangan pembaharuan.

Perubahan kecenderungan masyarakat di atas sangat berpengaruh terhadap pola hubungan, corak, dan kebudayaan buruh

pabrik yang setiap hari mengalami kontak sosial dengan mereka. Di samping itu, secara intern di lingkungan pabrik sendiri, perubahan itu juga cukup besar pengaruhnya dalam membentuk sikap dan perilaku buruh tersebut. Pemberlakuan jam-jam kerja yang tidak saja di pagi hari, namun juga di malam hari, telah mengubah cara hidup, kebiasaan, cara pergaulan dan cara pandang buruh terhadap etika dan lingkungannya. Akibatnya, perubahan tersebut segera diikuti pola oleh perubahan fundamental norma sosial masyarakat.

Perubahan-perubahan yang terjadi ini mendorong mereka mencari saluran-saluran untuk memenuhi kebutuhannya sebagai bagian masyarakat. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini tidak jarang bagi mereka untuk lebih suka mengambil bentuk-bentuk norma baru sebagai bagian dari norma sosialnya.

c. Masalah Moral

Persoalan moral ini muncul dan menjadi ada sebagai akibat dari serentetan masalah yang terjadi sebelumnya. Yang menjadi sorotan terhadap masalah moral ini adalah menyangkut etika dan perilaku buruh pabrik sebagai salah satu bagian dari masyarakat industri. Buruh pabrik yang berstatus sebagai urban dan memasuki lingkungan baru di kawasan industri mengalami proses sosialisasi yang tidak gampang untuk segera beradaptasi, karena interaksi sosial yang baru ini sangat berbeda dengan interaksi sebelumnya, yaitu sebelum mereka menjadi buruh dan memasuki kawasan industri di perkotaan yang sarat dengan berbagai macam bentuk kebudayaan. Lebih-lebih mereka berasal dari pedesaan dengan pendidikan yang relatif rendah, ditambah pengetahuan agama minim, serta rata-rata usia mereka yang tergolong belum dewasa dan sebagainya. Maka, mereka akan mudah terpengaruh dengan kehidupan kota yang demikian kompleks. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa dari 400 responden, ternyata hanya 30

responden (7,5%) saja yang lulusan perguruan tinggi. Selebihnya, yang berpendidikan sekolah dasar sebanyak 50 orang (12,5%), sekolah lanjutan pertama berjumlah 70 orang (17,5%), sedangkan yang berasal dari sekolah menengah umum sebanyak 250 orang (62,5%). Karena itu, banyak di antara mereka yang tidak mampu menyikapi hal-hal yang terjadi dan relatif baru bagi kehidupannya. Rincian data tentang variasi tingkat pendidikan buruh dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tingkat Pendidikan Buruh Pabrik

No.	Kotamadya/ Kabupaten	Tingkat Pendidikan			
		SD/ MI	SMP/ MTs	SMU/ MA	PT
1.	Surabaya	3	11	9	1
2.	Sidoarjo	2	11	31	4
3.	Mojokerto	4	1	2	-
4.	Gresik	15	18	2	-
	Jumlah	23	41	44	5

Di samping itu, pemberlakuan jam kerja yang ketat dan tidak permanen, rutinitas kerja yang menjemukan serta kegagalan beradaptasi di lingkungannya, mengakibatkan gejala kekeringan dan keterasingan secara batiniah di kalangan buruh pabrik. Bagi mereka yang tidak mampu mengendalikan keterasingan ini, maka berbagai bentuk penyimpangan moral dan rasa frustrasi akan menjadi konsekuensi logisnya. Dalam kondisi yang lebih akut, para buruh sudah tidak lagi mempedulikan rambu-rambu agama dan norma-norma sosial. Bentuk penyimpangan moral ini bisa berupa minum-minuman keras, mengkonsumsi narkoba, sabu-sabu, ekstasi, bergaul bebas antara laki-laki dan perempuan.

Akibat lebih jauh dari pergaulan bebas tersebut, sebagian besar karyawan perempuan dijumpai lebih senang mengeksploitasi

dirinya sebagai objek pelecehan seksual. Mereka lebih senang menonjolkan bagian tubuhnya untuk menjerat dan menarik perhatian lawan jenisnya yang tidak lain adalah kawan sekerjanya sendiri. Bentuk perilaku ini adalah sisi lain dari subjektivitas perempuan dan laki-laki dalam memperlakukan dirinya akibat kegagalan dalam menyesuaikan diri di lingkungannya.

Permasalahan di atas lebih jelas dapat diketahui melalui opini responden dalam hal kebebasan seks di masyarakat. Sepertiga lebih atau sebanyak 150 orang (37,5%) responden menyatakan bahwa kebebasan seks itu bertentangan dengan ajaran agama dan kehidupan moral masyarakat, namun secara pribadi mereka sulit menghindarkan diri dari perilaku seks bebas tersebut. Selanjutnya, hampir sepertiga yang lain sejumlah 124 orang (31%) menyatakan tidak tahu. Hanya sebanyak 66 orang atau 16,5% saja yang menyatakan secara tegas bahwa kebebasan seks adalah bertentangan dengan agama dan merupakan dosa besar yang harus dihindari. Adapun 15% lainnya, yakni 60 orang, menyatakan bahwa kebebasan seks adalah suatu yang wajar di lingkungan masyarakat modern. Artinya, secara langsung responden menyetujui kebebasan seks tersebut.

Persoalan moral yang ditandai dengan kebebasan seks dan perilaku sosial yang menyimpang tersebut merupakan cermin betapa beratnya hidup bermasyarakat di lingkungan industri dan berbuat sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Hal ini terjadi karena dipicu oleh ketidakberdayaan secara ekonomi, kegagalan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana mereka berada, tingkat pendidikan dan pengetahuan agama yang rendah.

d. Masalah Psikis

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa sebagian besar buruh pabrik yang berasal dari desa berasumsi bahwa keberangkatan mereka ke kota dan bisa bekerja di pabrik adalah

sebuah kesempatan emas untuk mengadu nasib yang tidak bisa dimiliki oleh setiap orang desa. Terlebih di saat krisis ekonomi seperti sekarang ini, mencari pekerjaan pengganti/alternatif begitu sulit. Di samping itu, mereka akan malu jika belakangan ternyata mereka mengalami kegagalan di tempat kerja dan harus kembali ke desa dengan tangan hampa. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mencegah keputusan PHK pabrik atas dirinya. Oleh karena itu, bekerja di pabrik dengan upah yang rendah adalah lebih baik daripada menganggur di rumah atau menjadi pembantu rumah tangga yang dipandang tidak bergengsi di kalangan generasi muda. Sementara itu, tuntutan-tuntutan untuk mendapatkan penghasilan sangat mendesak, karena mereka sudah hidup di kawasan perkotaan atau industri.

Dengan demikian, sikap ketergantungan buruh dengan pabrik adalah adanya unsur keterpaksaan dalam bekerja. Bahkan ada kesan seolah-olah mereka memaksakan diri untuk bekerja dengan risiko apapun, yang penting dapat bekerja dan dapat bertahan hidup di kota. Sementara itu, keterpaksaan mengabdikan pada dunia kerja dapat menimbulkan sikap apatis terhadap nilai-nilai kehidupan yang lain, terutama moralitas keagamaan, dengan berbagai konsekuensinya.

Bertolak dari beberapa persoalan di atas, selanjutnya dapat dipahami bahwa faktor emosi atau perasaan sangat besar peranannya dalam menentukan sikap para buruh pabrik sendiri. Data di lapangan membuktikan, pada umumnya mereka itu tidak banyak mengeluh tentang kondisi kerja, betapapun buruknya. Jika para buruh itu banyak mengeluh, pada umumnya bukan disebabkan oleh kondisi fisik yang benar-benar buruk dalam perusahaan, akan tetapi disebabkan oleh perasaan mereka tentang suasana yang ada di lingkungan pabrik tersebut. Bahkan mereka mempunyai semboyan: "yang penting bukan apa yang diperbuat oleh pimpinan atau manajer, akan tetapi cara melakukannya". Dalam

hal ini, bisa kita maklumi bahwa pemberian motivasi, penghargaan, dan hal-hal lain yang terkait dengan faktor psikologis menjadi penting di samping faktor kebutuhan materi para buruh tersebut. Karena yang demikian itu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku serta cara pandang para buruh itu terhadap lingkungan di mana mereka bekerja.

Di samping persoalan di atas, masalah lain yang selalu menghantui buruh pabrik adalah rasa takut, cemas, dan gelisah. Mereka takut jika honor yang mereka terima setiap minggu atau bulan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Mereka juga cemas jika tidak bisa menyisihkan sedikit untuk ditabung, sementara keluarga yang ditinggalkan selalu menanti bantuannya, lebih-lebih jika ia sebagai penopang ekonomi keluarga. Mereka juga gelisah jika apa yang telah diinginkannya—baik menyangkut masalah materi ataupun nonmateri, misalnya rasa cinta, rasa perlindungan, dan sebagainya—tidak pernah terwujud atau terus menerus menjadi buruh pabrik, di samping mereka menganggap tidak jelas status masa depannya.

Ketakutan, kecemasan, dan kegelisahan tersebut, jika dibiarkan begitu saja lambat laun akan menimbulkan gejala psikis yang tidak diinginkan, misalnya gangguan emosional, neurosa, stres, depresi, psikosomatis dan lain-lain. Bahkan hal itu bisa mengakibatkan berbagai macam gejala negatif lainnya seperti dendam, iri, cemburu, pedih hati, apatis, putus asa, dan lain-lain. Semua ini tidak saja membuat para buruh pabrik menjadi tidak bahagia dan *nervous*, akan tetapi juga sering menimbulkan perilaku menyimpang yang tidak hanya merugikan diri pekerja buruh pabrik sendiri, melainkan juga semua pihak yang terkait dalam lingkungan industri.

Begitu juga adanya *penyakit absensiisme* misalnya, (absen tidak masuk kerja bukan disebabkan oleh sakit fisik) yang

menimbulkan kerugian material besar pada pihak perusahaan atau pabrik, sebagian besar disebabkan oleh gangguan-gangguan emosional dan rasa tidak bahagia di pabrik atau perusahaan tersebut. Oleh karena itulah, akibat tidak terselesaikannya krisis batin mereka ini, sering menjadi pemicu bagi munculnya gejala patologis lainnya (penyakit sosial), moral maupun kerawanan-kerawanan lainnya.

Data di lapangan menunjukkan bahwa sebagian dari buruh pabrik, jika mempunyai persoalan yang sulit dipecahkan, seringkali mencari jalan pintas, misalnya mencopet, merampok, serta melakukan tindakan-tindakan menyimpang lainnya, dan bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, meskipun jumlahnya relatif sedikit.

Hal ini bisa dilihat dari hasil angket yang terjaring tentang sikap responden dalam menyelesaikan masalah-masalah (ekonomi, sosial, moral psikis, dan relegius) yang dihadapinya. Dari 400 responden, 178 orang atau 44,5% menyatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah selalu bermusyawarah atau berkonsultasi dengan teman sejawat. Sebanyak 204 orang atau 51 % minta bantuan orang yang usianya lebih tua/lebih dewasa dan berpengalaman, sedangkan 18 orang sisanya atau 4,5% menjawab cuek saja dan mencari jalan pintas. Walaupun jumlahnya sangat kecil, kiranya patut diwaspadai terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

b. Masalah Religius

Terjadinya migrasi dari desa ke kota, ternyata membawa perubahan yang sangat berarti bagi buruh pabrik. Kehadirannya ke lokasi industri menimbulkan pergeseran mata pencaharian yang semula sebagai petani, sekarang menjadi buruh di pabrik. Proses sosialisasi di antara mereka menyebabkan pertemuan antaretnik, budaya, dan agama. Akibatnya, mereka yang sebelumnya masih

relatif homogen dalam etnik dan agama, kini menjadi heterogen atau plural dalam suku, budaya, dan agama. Begitu juga sistem sosial yang dulunya relatif tertutup menjadi semakin terbuka.

Bertolak dari kenyataan sebagaimana digambarkan di atas, dalam kehidupan beragama, buruh juga mengalami perubahan. Perubahan tersebut antara lain dikarenakan jam kerja di pabrik, terutama pabrik-pabrik besar yang berlangsung selama 24 jam terus-menerus dengan sistem *shifting* (bergiliran). Kerja *shift* di pabrik-pabrik besar pada umumnya dibagi 3, dengan ketentuan masing-masing selama 8 jam. Bagi orang Islam, hal ini mempengaruhi pelaksanaan ibadah shalat, dari berjamaah di masjid-masjid atau mushalla di lingkungan tempat tinggalnya menjadi berpindah ke pabrik. Masalah ini akan mengurangi frekuensi kontak sosial dengan warga selingkungannya. Di lingkungan pabrik, kehidupan beragama khususnya pelaksanaan ibadah keagamaan sangat bergantung kepada pemilik atau pimpinan pabrik. Ada sebagian pabrik yang memperhatikan pelaksanaan ibadah karyawan, dan ada pula pabrik-pabrik yang tidak memperhatikan pelaksanaan ibadah karyawannya.

Bagi pemilik atau pimpinan pabrik yang memperhatikan ibadah karyawan pada jam kerja pabrik, mereka mengusahakan tempat ibadah dan waktu ibadah, seperti masjid atau mushalla. Bahkan ada pula pabrik-pabrik yang mengusahakan penceramah agama untuk para karyawan yang didatangkan dari luar dengan fasilitas pabrik. Pada pabrik yang menyediakan fasilitas pembinaan keagamaan, kehidupan agama karyawan dapat terpelihara dan bahkan dapat ditingkatkan. Namun, pada pabrik yang tidak menyediakan fasilitas dan waktu ibadah, seringkali kenyataan itu menjadi kendala bagi karyawan untuk melaksanakan ibadah agamanya. Dalam keadaan seperti itu kehidupan agama karyawan semakin merosot.

Sebagai akibat dari kurang diperhatikannya masalah-masalah keagamaan terutama yang menyangkut pribadi dan kebutuhan rohani para karyawan buruh pabrik ini, sering menimbulkan kegoncangan batin, iklim sosial yang kurang aman, dan ada kecenderungan untuk bertindak menyimpang dari aturan yang dibuat oleh pabrik. Ketaatan mereka terhadap aturan-aturan itu hanyalah bersifat semu dalam arti tidak tulus dan bahkan jauh dari nilai ikhlas. Apa yang dilakukannya selalu dihitung dan dipertimbangkan untung-ruginya secara matematis. Oleh karena itu, jika dalam situasi dan kondisi tertentu mereka merasa telah berbuat maksimal, kemudian tidak mendapatkan imbalan yang setimpal, maka mudah sekali mereka menuntut baik secara individu maupun secara massal dan kolektif yang kemudian lebih dikenal dengan demonstrasi para buruh terhadap pimpinan perusahaan di mana mereka bekerja.

Memang disadari bahwa persoalan religius di atas adalah persoalan yang tergolong abstrak dalam arti pengaruhnya tidak bisa dilihat langsung dan sangat subjektif. Meskipun demikian, bisa dibuktikan bahwa bagi pabrik yang mampu menciptakan suasana religius bagi para karyawannya, mereka rajin menjalankan ibadah shalat tepat waktu sesuai dengan aturan pabrik, ternyata mampu memberikan kontribusi meningkatkan produktivitas kerja, ketenangan batin, dan sekuritas emosional pada para buruh yang akan bekerja dalam iklim sosial yang aman, dan juga bisa memupuk moralitas, serta memberikan kepercayaan diri. Jadi, pada peristiwa semacam ini shalat yang dilakukan tepat waktu di lingkungan pabrik yang demikian padatnya, berfungsi secara positif bagi kedua belah pihak. Maka dari itu, dapat dinyatakan bahwa kepercayaan atau keyakinan beragama dari buruh tersebut bisa menambah solidaritas sosial dan menumbuhkan efektifitas kerja.

Dari data di lapangan diketahui bahwa antara pabrik yang memberikan perhatian terhadap masalah keagamaan para buruh

dengan yang tidak, terdapat perbedaan yang signifikan. Perbedaan itu ditandai dengan sering munculnya gejala demonstrasi dan tuntutan kepada pihak pabrik yang kurang memperhatikan kebutuhan rohani (keagamaan) atas perlakuan yang dirasa tidak seimbang dengan aktivitas kerja yang mereka lakukan. Di samping itu, seringnya mogok kerja dan produktivitas kerja menurun juga disebabkan adanya kegersangan secara rohani dan tidak adanya pembinaan mental secara kontinyu. Padahal mereka menyadari sepenuhnya bahwa banyak persoalan-persoalan hidup, ternyata tidak selalu bisa dipecahkan dengan akal semata. Sedang bagi pabrik yang memberikan perhatian penuh terhadap berbagai aktivitas keagamaan para buruh, relatif stabil, dan berjalan lancar. Kalaulah timbul masalah, tentu tidak separah pabrik yang kurang memperhatikan aktivitas keagamaan karyawannya.

B. Embrio Pesantren Buruh Pabrik: Signifikansi dan Relevansi

1. Dasar, Tujuan, dan Kurikulum Pendidikan

Pembinaan keagamaan terhadap buruh pabrik telah dilakukan oleh berbagai kalangan, misalnya pondok pesantren, perusahaan, dan majelis-majelis taklim yang dikelola masyarakat di sekitar pabrik. Pondok pesantren yang memiliki perhatian terhadap pembinaan keagamaan buruh pabrik, misalnya *Al-Asy'ari* dan *Al-Istiqomah* (Surabaya), *Masjid Baitullah* (Sidoarjo), dan *Al-Karimy* (Mojokerto). Sedangkan pengelolaan kegiatan keagamaan yang dilakukan di perusahaan dengan fasilitas dari pimpinan, seperti tampak pada perusahaan Ajinomoto di Mojokerto. Kegiatan keagamaan di perusahaan Ajinomoto dikelola oleh Ikatan Warga Muslim, yang anggotanya terdiri atas karyawan perusahaan yang beragama Islam. Sementara itu, majelis-majelis taklim yang memiliki perhatian terhadap pembinaan keagamaan buruh pabrik dilakukan, misalnya oleh Lembaga Kajian Keislaman

(LKK) *Jama'ah Tauhid* dan Persatuan Pemuda Netral *Al-Rasyid* (PPNA). Kedua majelis taklim tersebut berada di daerah Menganti, Gresik. Adanya ragam pengelolaan kegiatan keagamaan itu tentu saja melahirkan filosofi yang berbeda dalam hal latar belakang diadakannya aktivitas pendidikan keagamaan, tujuan, dan kurikulum yang diterapkan.

Pembinaan keagamaan terhadap buruh pabrik yang dilakukan pondok pesantren umumnya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor misalnya: agama, sosiologis, dan ekonomi. Faktor agama yang dimaksud di sini adalah keinginan para pengasuh pondok pesantren untuk menanamkan nilai-nilai moral-agama terhadap buruh pabrik. Para kiai merasa prihatin dengan religiusitas buruh pabrik, baik dalam hal pengetahuan maupun pengamalannya. Dalam konteks inilah para kiai berkepentingan menyebarkan dakwah Islam kepada buruh pabrik. Berkaitan dengan faktor agama ini dapat dicontohkan kehadiran Pondok Pesantren *Al-Istiqomah*, yang berada di Kendangsari, sebuah daerah yang dekat dengan areal perindustrian di Rungkut, Surabaya. Pondok Pesantren *Al-Istiqomah* sebelumnya merupakan kamar kos-kosan yang disewakan kepada buruh pabrik. Pemilik kos-kosan tersebut setiap bulannya dapat memperoleh pendapatan sekitar 1,5 juta rupiah. Perihal berubahnya status kos-kosan menjadi pondok pesantren, bermula dari keinginan keluarga, yang kebetulan anaknya baru datang dari pesantren *Bahrul Ulum* (Tambak Beras, Jombang), untuk menyebarkan ilmu agama Islam. Tentu saja, keinginan mengubah status kamar-kamar kos-kosan menjadi pondok pesantren tidak menguntungkan secara ekonomis. Bahkan sebagian tetangga menganggap hal itu sebagai tindakan yang keliru, karena dengan perubahan status tersebut keuntungan yang diperoleh rutin setiap bulan menjadi hilang. Tetapi karena didorong keinginan menyebarkan Islam kepada buruh pabrik, maka pertimbangan ekonomi itu diabaikan.

Sementara faktor sosiologis yang juga mendasari diadakannya pembinaan keagamaan terhadap buruh pabrik, terkait dengan meluasnya kebiasaan negatif yang dilakukan buruh pabrik seperti minum-minuman keras dan narkoba. Kebiasaan negatif buruh pabrik itu tentu saja tidak lepas dari latar belakang pendidikan yang minim dan tidak adanya upaya pembinaan moral-agama. Di samping kedua faktor tersebut, ternyata ada alasan-alasan ekonomis yang mendasari pembinaan keagamaan bagi buruh pabrik. Kenyataan seperti itu ditemukan melalui wawancara dengan pengasuh pondok pesantren *al-Asy'ari*. Menurutnya, pengelolaan yang benar terhadap buruh yang mau menjadi santri, di samping bernilai ibadah juga dapat mendatangkan keuntungan ekonomi. Pertimbangan ekonomi itu tampaknya tidak dapat dilepaskan dari pola kehidupan masyarakat di Surabaya, khususnya yang berada di sekitar pabrik, banyak di antaranya mengandalkan tambahan penghasilan dari hasil menyewakan rumah-rumah kontrakan/kos-kosan. Berkaitan dengan kenyataan tersebut, pengasuh pondok pesantren *al-Asy'ari* mengatakan:

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa hidup di kota besar seperti Surabaya, yang kata orang merupakan kota metropolitan kedua setelah Jakarta, memanglah sangat mahal sekali. Apalagi dengan kehadiran industri di daerah ini, membuat masyarakat sekitar berpikir bagaimana caranya mendapatkan keuntungan. Maka sebagian memanfaatkan peluang ini dengan membangun penginapan seperti kos-kosan di atas sebagian tanah yang dimilikinya. Dengan demikian masyarakat akan memperoleh keuntungan ganda, yakni dapat bekerja di pabrik dan keuntungan dari hasil sewa rumah. Dan, berkaitan dengan adanya peluang tersebut, maka pondok pesantren ini diwujudkan untuk dijadikan alternatif buruh pabrik yang mau tinggal di sini.

Tampaknya, keberadaan pondok pesantren dapat dijadikan alternatif bagi buruh pabrik untuk mukim di pondok yang pengeluarannya dapat dipastikan jauh lebih murah dibanding jika tinggal di rumah kontrakan (kos-kosan). Bagi pengelola pondok pesantren, kesediaan buruh pabrik mukim di pondok sekaligus

menjadi santri akan memungkinkan untuk membuka usaha-usaha komersial, seperti warung dan toko. Jika misalnya, warung dan toko itu dapat dikelola pondok pesantren, maka setidaknya keuntungan yang diperoleh dari usaha itu dapat digunakan menambah biaya operasional pondok.

Seperti halnya pondok pesantren, beberapa alasan yang mendasari diadakannya majelis-majelis taklim yang sebagian besar anggotanya adalah buruh pabrik, di antaranya bermula dari keprihatinan masyarakat terhadap kebiasaan buruh pabrik dan pemuda di kampung banyak yang terlibat minum-minuman keras, narkoba, dan persaingan antar kelompok (geng) yang acap kali melakukan tawuran. Kenyataan tersebut tentu saja dapat meresahkan masyarakat yang menginginkan kehidupan tenang dan damai. Keberadaan Lembaga Kajian Keislaman (LKK) *Jama'ah Tauhid* dan Persatuan Pemuda Netral *al-Rasyid* (Gresik), tidak dapat dilepaskan dari situasi tersebut. Kedua majelis taklim itu bertekad mengembalikan kehidupan pemuda dan buruh pabrik pada pola hidup yang agamis, seperti motto masyarakat Gresik, yang berbunyi; "Gresik berhias iman".

Sementara itu, pembinaan keagamaan terhadap buruh pabrik juga dilakukan di perusahaan dengan bantuan fasilitas dari pimpinan perusahaan, seperti yang dilakukan perusahaan Ajinomoto di Kabupaten Mojokerto. Kegiatan keagamaan di perusahaan ini dikelola oleh Ikatan Warga Muslim, yang jumlah anggotanya berjumlah sekitar 900 orang. Meski tidak semua anggota Ikatan Warga Muslim dapat mengikuti kegiatan keagamaan yang diadakan, tetapi mereka umumnya memiliki komitmen untuk mensukseskan kegiatan tersebut dengan jalan membayar iuran bulanan yang besarnya tidak ditentukan (sukarela). Kegiatan keagamaan di perusahaan Ajinomoto bermula dari keinginan karyawan muslim untuk memperoleh tambahan pengetahuan agama, sehingga ada keseimbangan antara kesibukan

kerja dan ketenangan batin dengan melakukan kegiatan keagamaan secara benar. Keinginan tersebut segera terwujud setelah dibentuknya Ikatan Warga Muslim sejak tahun 1991, yang antara lain bertanggung jawab terhadap kegiatan keagamaan. Dengan demikian, sejak saat itulah kegiatan keagamaan di perusahaan mulai ada, dan tahap demi tahap aktivitas tersebut berkembang hingga sekarang.

Mengenai kurikulum pendidikan yang diterapkan, baik di pondok pesantren, perusahaan, dan majelis-majelis taklim, sangat beragam. Bagi santri buruh pabrik di pondok pesantren, diajarkan materi pelajaran yang diambilkan dari kitab-kitab yang bersifat elementer, seperti; *Jalalayn* (tafsir), *Ta'lim al-Muta'alim*, *Dzurratun al-Nasihin*, *Irsyadul 'Ibad* (akhlak), *Fath al-Qarib* dan *Safinah al-Najah* (fiqh), *Bulugh al-Maram* (hadits), *Jurumiyah* (nahwu), dan lain-lain. Khusus bagi santri pemula diberi kesempatan belajar membaca al-Qur'an dengan metode iqra'. Di samping materi pelajaran agama, santri juga diberi kesempatan belajar ekstra-kurikuler seperti seni baca al-Qur'an (*qira'ah*), *khatmul Qur'an*, *istighasah*, *diba'*, *khithobah*, dan *hadrah*. Fenomena cukup menarik ditemukan ketika pengasuh pondok pesantren juga mengajarkan pelajaran keahlian itu diberikan sesuai dengan keinginan santri, seperti menjahit, mengetik, dan komputer, seperti yang terjadi di Pondok Pesantren *Al-Istiqomah*. Menurut pengasuh pondok, pelajaran keahlian itu diberikan sesuai dengan permintaan santri, dan untuk kepentingan ini santri bersedia menanggung biaya operasionalnya.

Secara lebih detail, kurikulum yang diterapkan pada masing-masing pondok pesantren dapat dilihat dari jadwal pelajaran dan jenis kitab yang diajarkan. Dari pelajaran yang diberikan di masing-masing pondok pesantren, kiranya dapat dikatakan bahwa pelajaran yang diajarkan memang diarahkan untuk pembinaan akhlak (moral). Asumsi tersebut setidaknya mendapat pem-

benaran dari kitab-kitab yang diajarkan seperti tampak pada tabel berikut:

Jenis Kitab yang Diajarkan Pondok Pesantren Al-Asy'ari

No.	Nama Kitab	Jenis Kitab
1.	Ta'lim Muta'alim	Akhlak
2.	Dzurrotun Nasihin	Akhlak
3.	Irsyadul 'Ibad	Akhlak
4.	Qurrotul 'Uyun	Akhlak
5.	Maslahul 'Abid	Akhlak
6.	Matan Zubad	Akhlak
7.	Akhlaqul Banin	Akhlak
8.	Fathul Qarib	Fiqh
9.	Safinatun Najah	Fiqh
10.	Sulam Taufiq	Fiqh
11.	Mukhtarul Ahadith	Hadith
12.	Jurumiyah	Nahwu/Sharaf

Dari beberapa jenis kitab yang diajarkan di pondok pesantren al-Asy'ari, tampak bahwa jenis kitab akhlak begitu mendominasi. Kenyataan tersebut tentu bukan sesuatu yang tanpa disengaja, tetapi memang kurikulum yang ditawarkan benar-benar ditujukan untuk membentuk mental dan akhlak buruh pabrik sehingga dapat menjadi orang yang berkepribadian baik. Dengan keahlian yang dimiliki ustadz-ustadz yang mengajarkan kitab-kitab tersebut, dan didukung sarana dan prasarana yang memadai, serta sistem pembelajaran yang bersifat klasikal, maka tujuan yang diinginkan pengelola pondok pesantren dapat tercapai.

Sementara itu, kegiatan keagamaan di perusahaan, seperti di Ajinomoto, tidak menggunakan kurikulum pendidikan tertentu, melainkan diatur berdasarkan tema-tema yang dianggap relevan dan aktual. Misalnya, pada jenis kegiatan mengaji al-Qur'an, yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis, materi yang diajarkan

meliputi; *tajwid*, *makhraj*, *tarjamah*, dan seni baca al-Qur'an. Sedangkan untuk kegiatan pengajian bulanan, pengelola hanya menentukan tema-tema secara garis besar, seperti tauhid, akhlak, dan ibadah. Mengenai rincian dari tema-tema tersebut, pengelola menyerahkan sepenuhnya kepada ustadz yang dihadirkan.

Berbeda dengan kegiatan yang dikelola di perusahaan, kegiatan-kegiatan keagamaan yang dikelola majelis-majelis taklim, seperti Lembaga Kajian Keagamaan (LKK) *Jama'ah Tauhid* dan Persatuan Pemuda Netral *Al-Rasyid*, menggunakan kurikulum yang agak sama dengan pondok pesantren. Pada Lembaga Kajian Keagamaan (LKK) *Jama'ah Tauhid*, yang berada di Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, mengarahkan kurikulum pendidikannya untuk mengkaji masalah ketauhidan (*ushul al-din*). Kelompok majelis taklim ini berorientasi sebagai gerakan tarekat yang memiliki tujuan penyucian batin bagi jama'ahnya. Karenanya, tidak mengherankan jika kitab-kitab yang diajarkan diambilkan dari berbagai sumber sebagaimana banyak dipakai kelompok-kelompok tarekat. Kitab-kitab yang diajarkan pada majelis taklim ini, di antaranya seperti; *Ushul Ma'rifah* (karya KH. Faqih Kholil, mursyid sebuah tarekat di Pasuruan), *Hidayah Ummah* (karya KH. Hasan Husain, alim terkemuka dari Pasuruan yang lama mukim di Makah), *al-Hikam* (karya Ibn Atha'illah), *Minhaj al-Saniyyah* (karya Syaikh Abu Ishaq Ibrahim), *Qathr al-Ghaith* (karya Sayyid Utsman bin Abdullah), dan *Ihya 'Ulumuddin* (karya Imam Al-Ghazali).

Salah satu kegiatan Lembaga Kajian Keagamaan (LKK) *Jama'ah Tauhid*, dikenal dengan nama *Jam'iyah 'Ataqah*, biasanya dilaksanakan sebulan sekali, yakni setiap Minggu Legi. Secara literal, arti 'ataqah adalah pembebasan, kemerdekaan. Kegiatan 'Ataqah dilakukan secara massal, diikuti seluruh anggota jama'ah dengan membaca lafal *la ilaha illa Allah* sebanyak 70.000 kali. Ajaran ini berdasarkan tradisi tarekat yang dilakukan oleh mursyid

dari Pasuruan, yakni KH. Faqih Kholil dan KH. Hasan Husain. Susunan acara *'Ataqah* adalah; pembukaan, pembacaan ayat-ayat al-Qur'an (dilakukan salah seorang anggota), sambutan dari peserta, kajian keislaman oleh pemimpin jama'ah (Ustadz Tamanni Nasrullah), acara inti *'Ataqah*, dan do'a penutup. Dari rangkaian acara tersebut, jama'ah diharapkan dapat melakukan *fana'* (mengosongkan) dirinya dari akhlak tercela sehingga kesucian diri dapat terwujud.

Kelompok majelis taklim Persatuan Pemuda Netral *Al-Rasyid*, yang berada di daerah yang sama dengan Kelompok Kajian Keagamaan *Jama'ah Tauhid*, mengembangkan kurikulum pendidikan yang lebih berbobot. Materi yang diajarkan berkisar pada pelajaran al-Qur'an, praktik ibadah, fiqh, akhlak, bahasa Arab, dan amalan tarekat. Materi tersebut diajarkan kepada santri yang dikelompokkan menjadi; santri laki-laki dan santri perempuan. Anggota jama'ah diajarkan ilmu syari'at dan tasawuf sekaligus. Di bidang syari'at, diajarkan kitab *Nashaih al-'Ibad*, sedangkan amalan tarekat yang diajarkan adalah *Shalawat Fatih*, karangan al-Tijani, tokoh terkenal tarekat al-Tijani.

2. Unsur Pendukung Kegiatan Keagamaan

Unsur-unsur pendukung kegiatan keagamaan amat beragam, mulai dari; ustadz, kitab agama, ruang belajar, masjid/mushalla, kantor, aula, papan tulis/*white board*, kamar santri (pondokan), dan lain-lain. Kelengkapan sarana pendukung kegiatan keagamaan salah satunya ditentukan oleh besar kecilnya jumlah santri. Bagi pesantren yang memiliki jumlah santri relatif besar, hampir dapat dipastikan sarana pendukungnya baik. Salah satu contohnya adalah Pesantren *Al-Asy'ari*, yang memiliki 10 *asatidz* (guru), masjid, ruangan belajar, pondokan (dibagi menjadi dua blok perempuan dan laki-laki), papan tulis, balai pertemuan, kantin, dan sarana MCK. Sebagian dana untuk pembangunan sarana yang ada

diambilkan dari hasil iuran santri. Demikian halnya dengan Pondok Pesantren *Al-Istiqomah* yang juga memiliki sarana prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan keagamaan. Aktivitas keagamaan dilakukan dengan menggunakan ruangan belajar (3 ruang), masjid, aula, papan tulis, dan kitab yang telah disediakan.

Sarana pendukung kegiatan keagamaan dalam keadaan yang lebih lengkap dapat ditemukan di pesantren *Masjid Baitullah*, yang berlokasi di Bungurasih Timur, dekat pintu keluar bus antar kota terminal Bungurasih. Pondok pesantren tersebut telah memiliki kelas *diniyah* yang dilaksanakan pada sore dan malam hari. Seluruh kegiatan keagamaan dilakukan dengan sistem klasikal, memanfaatkan sarana yang telah ada, misalnya lokal (16 lokal) dan masjid, dengan perincian; 7 lokal untuk kegiatan diniyah, 2 lokal untuk perkantoran, 4 lokal untuk ruang perpustakaan dan komputer, dan 3 lokal untuk disewakan. Tujuh lokal yang digunakan untuk kegiatan diniyah dibagi menjadi dua kelas; 3 kelas *i'dad* (persiapan) dan 4 kelas diniyah sesuai tingkatan. Unsur penunjang yang lain adalah ustadz yang berjumlah 9 orang (6 laki-laki dan 3 perempuan), yang semuanya disediakan tempat tinggal di lokasi pesantren. Semua kebutuhan tenaga pengajar, mulai dari makan, pondokan, honor, dan keperluan sehari-hari, disediakan pengasuh pondok, yakni Bapak H. Muhadi dan keluarga besar Ibu Hj. Mansur. Dengan sarana yang demikian memadai, maka pendidikan agama di pesantren tersebut berlangsung dengan baik.

Sementara itu, sarana penunjang kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di perusahaan, seperti yang dilakukan perkumpulan Ikatan Warga Muslim di pabrik Ajinomoto, umumnya memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan pimpinan perusahaan. Berbagai jenis kegiatan keagamaan di perusahaan tersebut dipusatkan di masjid *Baitur Rahim*, yang dibangun perusahaan sejak tahun 1991. Sarana pendukung lainnya adalah *white-board*, bangku, buku *Iqra'* (6 jilid), al-Qur'an, dan aula yang secara khusus disediakan

perusahaan untuk kegiatan pengajian bulanan. Di samping itu, perusahaan juga memberikan bantuan pendanaan yang besarnya ditentukan berdasarkan permintaan yang diajukan ketua Ikatan Warga Muslim. Berdasarkan kebiasaan, perusahaan setiap bulan memberikan bantuan untuk kegiatan keagamaan sebesar Rp1,5 juta. Bantuan pendanaan yang diberikan secara rutin itu belum termasuk gaji bagi empat orang ustadz yang juga ditanggung perusahaan, yang besarnya masing-masing Rp150.000,00 per bulan. Selain mendapat bantuan dana, anggota Ikatan Warga Muslim juga membayar iuran bulanan yang besarnya tidak ditentukan (suka-rela). Dari iuran bulanan anggota diperoleh sedikitnya Rp400.000 setiap bulan. Dengan sarana pendukung yang ada serta bantuan pendanaan yang diberikan perusahaan dan iuran anggota, maka kegiatan keagamaan yang dikelola Ikatan Warga Muslim perusahaan Ajinomoto dapat dilaksanakan secara efektif.

3. Aktivitas Pendidikan Sehari-hari

Kegiatan pendidikan agama buruh pabrik yang dikelola pesantren, perusahaan, dan majelis-majelis taklim didesain berdasarkan waktu-waktu luang yang dimiliki buruh pabrik. Bagi buruh pabrik yang memiliki *shift* malam, diwajibkan mengikuti kegiatan pendidikan agama pada siang/sore hari, demikian halnya yang mendapat giliran *shift* siang, wajib mengikuti kegiatan pada malam hari. Perbedaan *shift* kerja memang menjadi problem bagi pengelola kegiatan agama baik yang dilakukan pesantren, perusahaan, maupun majelis-majelis taklim. Salah satu contohnya adalah kegiatan agama yang dikelola Ikatan Warga Muslim di perusahaan Ajinomoto. Di sini, kegiatan keagamaan rutin seperti belajar al-Qur'an, dilaksanakan pada pukul 11.00-12.00 setiap hari Senin dan Kamis. Kegiatan tersebut jelas tidak dapat diikuti buruh pabrik yang memiliki *shift* malam, karena pada siang hari mereka umumnya istirahat di rumahnya masing-masing yang terkadang

jauh dari lokasi pabrik. Kenyataan tersebut tampaknya menjadi kendala tersendiri bagi pengelola, sehingga kegiatan pendidikan agama di perusahaan belum dapat dimanfaatkan anggota Ikatan Warga Muslim secara maksimal. Untuk diketahui, dari 900 anggota Ikatan Warga Muslim, hanya sekitar 100-200 orang saja yang dapat mengikuti kegiatan pendidikan agama, dan selebihnya tidak dapat aktif karena persoalan *shift* kerja, jarak kos-kosan yang jauh, dan kesadaran yang masih kurang.

Di samping kegiatan belajar al-Qur'an, kegiatan pendidikan agama yang juga dikelola Ikatan Warga Muslim adalah pengajian rutin bulanan, khatmul Qur'an, istighasah, dan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Kegiatan keagamaan di perusahaan Ajinomoto akan mengalami peningkatan frekuensinya selama bulan Ramadhan. Selain kegiatan-kegiatan rutin, seperti yang telah disebutkan, Ikatan Warga Muslim juga mengadakan kegiatan yang dinamakan dengan "Dhuhur Bersama" yang diisi dengan pengajian agama. Pada kesempatan tersebut, ustadz akan memberikan penjelasan seputar masalah akidah, akhlak, dan ibadah, yang selanjutnya disertai dialog terhadap permasalahan yang dianggap masih membutuhkan penjelasan lanjutan.

Sementara itu, kegiatan pendidikan agama bagi buruh pabrik yang dikelola pesantren, umumnya diadakan pada malam hari. Waktu malam hari dipilih untuk kegiatan pendidikan agama, karena mayoritas santri buruh pabrik bekerja pada siang hari. Materi pelajaran yang dikaji sangat bervariasi, meliputi akhlak, fiqh, al-Qur'an, Hadits, bahasa Arab, tauhid, dan bidang keterampilan, seperti menjahit, komputer, dan mengetik. Di samping itu terdapat pelajaran ekstra kurikuler seperti; diba', seni baca al-Qur'an, istighasah, hadrah, dan khitobah (latihan khutbah). Materi-materi pelajaran tersebut biasanya disusun berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan, dan santri buruh pabrik tinggal mengikuti kegiatan yang diadakan.

Aktivitas pendidikan agama yang berlangsung di pesantren, biasanya dimulai ba'da jama'ah shalat Isya'. Beberapa pesantren, seperti Al-Asy'ari, Al-Istiqomah, masjid Baitullah, dan Al-Karimy, menetapkan waktu belajar bagi buruh pabrik yang memiliki *shift* siang, pada setiap malam hari, sekitar pukul 19.30-22.00 WIB. Setelah itu mereka dianjurkan belajar mandiri atau kelompok sebelum akhirnya istirahat hingga datang waktu Shubuh. Waktu ba'da Shubuh, santri juga diwajibkan belajar mengaji al-Qur'an hingga pukul 05.30 WIB. Selanjutnya mereka mulai bersiap-siap berangkat bekerja ke pabrik. Sementara itu bagi santri yang memiliki *shift* malam, mendapat kesempatan belajar agama pada waktu sore hari, ba'da shalat ashar. Jumlah santri buruh pabrik yang mendapatkan *shift* malam memang relatif kecil, sehingga mereka tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan di pesantren yang umumnya pada malam hari. Di samping itu, mereka merasa tidak nyaman jika istirahat di pesantren pada siang hari setelah pada malam harinya bekerja.

Corak pendidikan agama bagi buruh pabrik, tampak agak berbeda sebagaimana yang dilakukan oleh majelis taklim Lembaga Kajian Keagamaan (LKK) *Jama'ah Tauhid* dan Persatuan Pemuda Netral *Al-Rasyid*. Kedua majelis taklim tersebut mengarahkan program kegiatan pendidikan agama seperti halnya kelompok-kelompok tarekat. Corak tarekat tampak pada materi pelajaran dan sistem pembelajaran yang diterapkan kedua majelis taklim tersebut. Lembaga Kajian Keagamaan (LKK) *Jama'ah Tauhid* mempraktikkan sistem *bai'ah* (pengambilan sumpah setia) pada setiap anggota jama'ah yang dilakukan oleh KH. Syamsul Ma'arif, seorang *mursyid* dari desa Ngebet, Cerme, Gresik. Sementara majelis taklim Persatuan Pemuda Netral *Al-Rasyid* secara khusus mempraktikkan tarekat Tijani dengan membaca shalawat fatih.

Sebagai gambaran, aktivitas keagamaan yang dilakukan Persatuan Pemuda Netral *Al-Rasyid*, tampak pada jadwal berikut:

Jadwal Kegiatan Pendidikan Agama di Lingkungan

No.	Hari	Materi Pengajian	
		Santri Laki-laki	Santri Perempuan
1.	Jum'at malam	Al-Qur'an dan praktek salat	-
2.	Sabtu malam	-	Tajwid, Al-Qur'an dan Ta uhid
3.	Minggu malam	-	Sharaf, I'la', dan Fiqh
4.	Senin malam	Fiqh (Kitab Sullam al-Ta'ufiq)	-
5.	Selasa malam	-	Bahasa Arab, Akhlak
6.	Rabu malam	Nasaih al-'Ibad	-
7.	Kamis malam	Tarekat (shalawat Fatih)	-

C. Pesantren Buruh Pabrik sebagai Alternatif

Keberadaan “embrio” pesantren buruh pabrik di areal perindustrian di keempat wilayah penelitian: Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan Gresik mempunyai arti yang signifikan tidak hanya bagi masyarakat “asli” di sekitar pabrik, tetapi juga bagi para pendatang yang menjadi buruh pabrik. Kalau dicermati bahwa keberadaan “embrio” pesantren buruh pabrik tidak lepas dari kondisi keprihatinan dari orang yang sangat *concern* terhadap realitas kehidupan di wilayah perindustrian. Proses industrialisasi yang begitu gencar digalakkan oleh pemerintah dengan beralih meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menyediakan lapangan kerja baru, ternyata tidak diimbangi dengan proses pembinaan dalam hal yang berkaitan dengan masalah mental spiritual. Pemilik modal jelas hanya menganut prinsip ekonomi, yakni mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan jalan “mengeksplorasi” buruh pabrik yang tidak mempunyai *bargain position* cukup tinggi. Pemilik modal hanya tahu urusan dengan bagaimana buruh datang tepat pada waktunya, bekerja dengan keras, dan membayar mereka tiap akhir minggu atau bulan sesuai dengan kontrak kerjanya. Pemilik modal, tampaknya tidak mau peduli tentang apakah cukup gaji yang diterima buruh pabrik, misalnya untuk mengontrak kamar yang layak (*convenience*) untuk melepas letih habis bekerja, gizi makanan yang memadai,

atau sandang, bahkan tidak cukup peduli dengan mental spiritual buruh pabriknya.

Kondisi ini ditunjang oleh latar belakang keagamaan yang kurang kuat dan jauh dari pengawasan orang tua yang mengakibatkan—sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya—banyak buruh pabrik yang tidak tahu harus berbuat apa dalam hidupnya. Banyak dari mereka yang merasa bahwa mereka tak lebih hanya sekadar robot pemilik modal. Mereka kehilangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan mental spiritualitas juga tercerabut dari kehidupannya. Akibatnya banyak di antara mereka yang terjerumus ke dalam perbuatan asusila, misalnya mabuk-mabukan, mengonsumsi narkoba, dan seks bebas.

Melihat situasi yang demikian, orang-orang yang memiliki ilmu agama yang cukup tinggi dan mempunyai kepedulian terhadap lingkungan di sekitar areal perindustrian mencoba—pada awal mulanya—untuk mengadakan pengajian tidak hanya bagi buruh pabrik tetapi juga bagi masyarakat sekitarnya. Lambat laun, kegiatan keagamaan bertambah besar dan akhirnya banyak yang mendirikan pondok pesantren.

Keberadaan pondok pesantren di areal perindustrian mempunyai arti yang strategis sebagai wahana pembinaan mental spiritual yang sudah terkikis dari pribadi-pribadi buruh pabrik. Dari perspektif pengelola pesantren, aktivitas yang diadakan di pesantren merupakan tanggung jawab dari pengelola (kiai) dalam mentransfer ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari perspektif santri buruh pabrik, berdirinya pesantren di sekitar areal perindustrian mempunyai peran dalam membantu mereka dalam memecahkan persoalan sehari-hari yang dihadapinya, misalnya persoalan ekonomi, sosial, psikis, mental, dan religiusitas.

1. Pemecahan Masalah Ekonomi

Persoalan ekonomi merupakan persoalan klasik sekaligus krusial bagi para pemilik modal dan buruh pabrik, dua kelompok yang mempunyai kepentingan yang bertolak belakang. Pemilik modal ingin buruh pabrik sebisa mungkin dieksploitasi dengan imbalan upah yang semurah-murahnya. Sebaliknya, buruh pabrik menuntut upah yang seimbang dengan jam kerja dan tenaga yang dikeluarkan. Meskipun terjadi tarik menarik kepentingan, *bargain position* buruh pabrik selalu lemah dan kalah, sehingga masih banyak ditemui buruh pabrik yang menerima upah di bawah UMR yang ditetapkan pemerintah.

Keberadaan buruh untuk bekerja di pabrik dilatarbelakangi oleh persoalan ekonomi. Sebagaimana disebutkan di bab sebelumnya bahwa latar belakang ekonomi orang tua buruh pabrik yang pas-pasan menuntut mereka harus meninggalkan desa untuk bekerja di kota/pinggiran kota. “Iming-iming” atau tawaran bahwa menjadi buruh pabrik akan mendapatkan upah yang menjanjikan merupakan rangsangan untuk segera melakukan urbanisasi. Di samping persoalan di atas, persoalan gengsi juga tidak bisa dilepaskan. Masyarakat secara umum juga merasa lebih mempunyai status yang lebih tinggi dibanding menjadi buruh tani di pedesaan, atau bahkan hanya sebatas pengangguran.

Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan pemerintah, sebenarnya hanya cukup untuk memenuhi Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) buruh pabrik, apalagi buruh pabrik, yang karena terpaksa, harus bekerja dan menerima upah di bawah standar. Melihat perbandingan antara *income* dari upah yang diterima dengan *living cost* yang harus dikeluarkan oleh buruh pabrik ditambah dengan persoalan-persoalan sosial dan mental spiritual yang juga terkikis, maka kehidupan buruh pabrik sangatlah terpuruk. Hadirnya “embrio” pesantren buruh pabrik merupakan

oase di tengah keterpurukan ekonomi dan mental spiritual. Pendirian “embrio” pesantren buruh pabrik dari aspek ekonomi sangatlah menolong santrinya yang juga buruh pabrik di daerah sekitarnya. Dengan tersedianya fasilitas pemondokan dengan uang infaq atau sedekah yang sangat murah dibanding tinggal di kamar kos-kosan, santri dapat dengan tenang istirahat. Uang infaq atau sedekah yang dibayarkan oleh santri, termasuk santri buruh pabrik sekitar Rp5.000,00-Rp10.000,00 per bulannya. Nilai nominal yang dibayarkan tersebut 1/6 bahkan 1/10 dari uang sewa kamar kos-kosan.

Di samping menyediakan fasilitas pemondokan, ditemukan beberapa pesantren yang memberikan jasa catering dengan harga yang sangat murah dibanding harga makanan di luar. Ada pesantren yang menyediakan jasa catering sekali, namun ada juga yang menyediakan jasa tersebut dua kali sehari. Tidak ada “embrio” pesantren buruh pabrik yang menyediakan jasa catering tiga kali sehari. Hal ini disebabkan ketika buruh pabrik bekerja, mereka tidak mungkin pulang hanya sekedar makan siang atau makan malam di pesantren. Mereka bisa, secara bebas, makan di sekitar areal mereka bekerja. Tabel berikut menjelaskan secara jelas perbandingan “tarif” tinggal di “embrio” pesantren buruh pabrik dan di kos-kosan, berikut perbandingan harga makanan yang disediakan pesantren di luar.

Pengeluaran Buruh Pabrik yang Tinggal di Pondok Pesantren dan di Luar Pondok Pesantren

Embrio Pesantren Buruh Pabrik		Di Luar Pondok Pesantren	
Infaq Pemondokan Rp.5.000-Rp. 10.000	1 x Makan Rp.600-Rp.750	Sewa Kamar Rp.30.000-Rp.50.000	1 x Makan Rp.1000-Rp.1500

Di samping pengeluaran di atas, bagi buruh pabrik yang tinggal di luar pesantren ada kemungkinan juga mengeluarkan dana ekstra di luar dua kebutuhan di atas. Hal ini disebabkan godaan

teman, dengan berbagai dalih, misalnya solidaritas sesama teman, keluar untuk jalan-jalan, terutama malam Minggu, dan ke tempat-tempat hiburan yang cukup banyak tersedia di daerah perkotaan. Hal ini cukup kontras dengan buruh pabrik yang tinggal di “embrio” pesantren buruh pabrik. Meskipun ada “rihlah” atau bepergian yang terjadwal, adanya jadwal belajar yang cukup panjang ditambah kewajiban-kewajiban lainnya di pondok, sangatlah kecil bagi mereka untuk “keluyuran”. Dengan demikian, kecil kemungkinannya bagi buruh pabrik untuk *spend money* terkait hal-hal tersebut di atas.

Melihat perbandingan di atas, jelas bahwa buruh pabrik yang tinggal di pesantren bisa menghemat uang gaji bulanannya jauh lebih besar dibanding mereka yang tinggal di luar pondok. Hal ini berimbas pada sisa uang gaji yang dapat ditabung dan sekaligus yang dapat dikirimkan kepada keluarga.

Meskipun tinggal di “embrio” pesantren buruh pabrik, secara ekonomis, mempunyai arti yang signifikan, akan tetapi itu bukan menjadi tujuan utama bagi santri buruh pabrik untuk tinggal di pesantren. Ada faktor-faktor lain yang lebih utama yang menjadi pertimbangan, misalnya keinginan memperdalam agama, untuk tinggal di “embrio” pesantren buruh pabrik.

2. Pemecahan Masalah Sosial

Keberadaan industrialisasi, langsung atau tidak langsung, mempunyai dampak sosial bagi masyarakat di kawasan yang secara kebetulan di-”gusur” menjadi areal perindustrian (pabrik) maupun bagi pendatang. Ekspansi lahan perindustrian mengarah pada areal-areal pinggiran kota yang dulunya tergolong masih *isolated areas* dengan kekhasan budaya pedesaan yang saling bahu-membahu (gotong royong) dalam mengerjakan sesuatu, tolong-menolong dengan dilandasi rasa keikhlasan, toleransi tinggi dan tradisi keagamaan yang masih kuat, misalnya yasinan dan

tahlilan tiap hari Kamis dan Jum'at, membaca shalawat diba', perayaan hari-hari besar umat Islam dan sebagainya.

Keberadaan industri, secara perlahan mengubah *the established culture*. Penduduk setempat yang mulanya sangat *helpful* dan tenggang rasa sesama tetangga, misalnya lahan kosong yang dimiliki bisa dimanfaatkan oleh tetangga yang kurang berada untuk ditanami atau digunakan untuk keperluan ekonomi yang lain tanpa dipungut biaya. Akibat industrialisasi, masyarakat yang mempunyai lahan kosong cenderung untuk memanfaatkan lahan kosongnya untuk dijadikan kos-kosan untuk disewakan kepada pendatang. Mereka, pada akhirnya, sangat berorientasi pada persoalan ekonomi; bagaimana mereka memanfaatkan lahan yang dimilikinya untuk dijadikan tempat kos-kosan. Dulu sebelum pabrik-pabrik besar berdiri, antar masyarakat di areal tersebut saling gotong royong membangun rumah warga setempat tanpa harus membayar, tetapi dengan adanya industrialisasi, gotong royong mulai hilang dan semuanya diganti dengan nominal uang. Persoalannya, mereka yang membangun rumah, tujuan utamanya adalah komersialisasi rumah yang dibangun tersebut untuk kos-kosan atau usaha bisnis lainnya (misalnya warung), sehingga masyarakat lainnya memperhitungkan juga unsur bisnisnya ketika akan membantu.

Persoalan lainnya yang muncul adalah ketika sesama penduduk setempat yang mempunyai kamar-kamar yang siap dikontrakkan, mereka bersaing satu sama lain, bahkan tidak menutup kemungkinan saling menjelekkkan agar pendatang (buruh pabrik) mengontrak kamar yang dimilikinya. Inilah penyebab renggangnya hubungan antartetangga di masyarakat tersebut. Bahkan agar kamarnya laku dikontrak terkadang mereka juga tidak peduli, apakah kamar-kamar dalam rumah yang dikontrakkan tersebut dihuni laki-laki dan perempuan. Yang penting bagi mereka, kamar-kamar tersebut terkontrakkan dan dapat memberi

income tiap bulan bagi pemiliknya. Kondisi terakhir ini juga punya andil yang cukup besar dalam menimbulkan persoalan-persoalan antarburuh pabrik dan antarburuh pabrik dengan masyarakat sekitar (penduduk asli), misalnya pergaulan bebas di antara mereka, minum-minuman keras dan tidak menutup kemungkinan—seperti yang pernah terjadi—yakni perkelahian antarmereka.

Akumulatif persoalan yang ada sebagaimana tersebut di atas mengarah pada sikap hidup yang lebih bersifat individualistik. Masing-masing orang hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Akhirnya perkumpulan yang dulunya sering dilakukan melalui kegiatan yasinan atau tahlilan maupun acara-acara keagamaan berangsur-angsur redup. Kalaupun ada hanya segelintir orang, itupun yang sudah berusia lanjut dan masih aktif untuk mengikutinya, sedang anak-anak muda sudah meninggalkannya.

Keberadaan “embrio” pesantren buruh pabrik mencoba mengembalikan budaya asli dan mempertemukan budaya-budaya yang dibawa kaum pendatang dengan budaya yang ada di kalangan masyarakat sekitar di mana pesantren itu berdiri. Keberadaan Pesantren Al-Istiqomah misalnya, mempunyai peran yang sangat penting di kawasan Kendangsari, Rungkut. Masyarakat setempat berikut para buruh pabrik pendatang sudah lama tidak mengadakan gotong royong dan atau mengadakan acara-acara keagamaan yang dilakukan secara bersama-sama.

Keberadaan “embrio” pesantren buruh pabrik mengembalikan tradisi yang sudah pernah berkembang. Tradisi mereka bergotong royong pun kembali lagi. Terbukti pengembangan pondok sepenuhnya ditunjang oleh masyarakat sekitar meskipun pengasuh pesantren tersebut tidak pernah mengajukan permohonan bantuan kepada masyarakat sekitar. Bangunan *hall*, misalnya, yang direncanakan tiga lantai, tahap demi tahap berjalan. Masyarakat sekitar, berikut buruh pabrik baik yang tinggal

di “embrio” pesantren maupun yang tinggal di sekitar pondok menyadari bahwa keberadaan pondok mempunyai arti yang sangat penting dan karena itu perlu di-*support*. Tidak hanya masyarakat dan santri buruh pabrik yang mau bahu membahu menyokong “embrio” pesantren, pabrik di mana santri “embrio” pesantren buruh pabrik bekerja, dengan kesadaran yang tinggi mereka juga turut membantu pengembangan pondok. Latar belakang partisipasi pondok untuk membantu pesantren adalah buruh pabrik yang tinggal di “embrio” pesantren mendapat acungan jempol dari pemilik modal bahwa mereka pekerja ulet dan jujur.

Tidak cuma putera-puteri masyarakat sekitar yang mendapat pelajaran mengaji dan pelajaran agama dari pengasuh “embrio” pesantren buruh pabrik yang ustadznya kebanyakan terdiri dari buruh pabrik yang sudah lama mondok di sana sehingga mereka mengenal huruf-huruf Arab dan bisa membaca Al-Qur’an, orang tua mereka pun meminta waktu khusus untuk belajar mengaji sekaligus belajar ilmu agama melalui pengajian rutin yang diadakan.

Nilai positif yang diberikan santri “embrio” pesantren buruh pabrik maupun masyarakat sekitar di Kabupaten Gresik adalah mampu mengubah pandangan buruh pabrik yang inginnya hura-hura dengan kawan sejawatnya dengan memakai narkoba dan menenggak minuman keras menjadi seorang santri yang taat dalam menjalankan perintah agama. Masyarakat sekitar merasa bersyukur dengan berdirinya “embrio” pesantren buruh pabrik, karena sejak berdirinya pesantren tersebut, tingkat kriminalitas di daerah tersebut berangsur-angsur surut.

3. Pemecahan Masalah Psikis

Harus diakui bahwa keberadaan industrialisasi mempunyai dampak psikologis tidak hanya bagi masyarakat sekitar pabrik,

tetapi juga bagi buruh pabrik. Dari segi masyarakat sekitar, keberadaan pabrik setidaknya akan menimbulkan rasa takut akan dehumanisasi yang dapat mencabut tradisi dan budaya serta nilai-nilai spiritual yang sudah ada. Kebiasaan bersama-sama dalam suasana kekeluargaan dan toleransi yang tinggi antara warga negara berubah menjadi individualistik. Masyarakat, pada akhirnya, banyak merasakan kesepian dan kesendirian, karena semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing, bahkan tak jarang dijumpai mereka sudah tidak peduli sesama tetangga.

Ketakutan dan kegelisahan juga menghinggapi kaum tua dan remaja penduduk asli dalam hal perekrutan tenaga kerja pabrik. Dalam kondisi persaingan yang kompetitif untuk memperoleh lapangan pekerjaan, tidak jarang tenaga kerja yang dibutuhkan banyak didatangkan dari luar, padahal tenaga kerja yang produktif di sekitar areal perindustrian tersebut cukup banyak. Hal ini dikarenakan proses rekrutmen tenaga kerja yang disyaratkan oleh pabrik kebanyakan tidak bisa dipenuhi oleh penduduk setempat, tetapi dipenuhi oleh para pendatang. Kondisi ini bisa menimbulkan kecemburuan masyarakat asli tidak hanya kepada buruh yang diterima, tetapi juga pada pabrik itu sendiri yang berakhir pada permusuhan yang diwujudkan dengan pencurian, pengrusakan atau bahkan mendemo pabrik dengan permintaan agar masyarakat asli diberi jatah untuk diterima di sana.

Kondisi psikis yang sudah demikian kompleks, ditambah dengan pendatang yang membawa hal-hal baru di wilayah pabrik. Bertemu mereka, apalagi rata-rata berusia muda yang haus akan hiburan, dan ditunjang tersedianya sarana prasarana untuk melampiaskan jiwa mudanya tanpa pengawasan yang ketat, baik dari orang tua maupun masyarakat sekitar, tidak menutup kemungkinan mereka terjerumus ke hal-hal yang negatif. Kondisi ini dapat pula mengakibatkan rasa tidak aman pada masyarakat sekitar, terutama bagi putera-puteri mereka yang masih kecil.

Bagi buruh pabrik, persoalan-persoalan di pabrik banyak menimbulkan persoalan-persoalan psikis. Persoalan kedisiplinan, misalnya, sering dipakai pihak pabrik sebagai alat untuk menakuti buruh pabrik. Yang sering menjadi persoalan adalah waktu istirahat yang “kurang” di siang hari. Persoalannya bukan pada durasi waktu, melainkan dalam waktu sekitar 30 menit-1 jam, dengan jumlah buruh pabrik yang ribuan jumlahnya, mereka terkadang harus berebutan untuk makan siang dan sering terjadi kendala untuk melakukan ibadah shalat dzuhur karena mushalla yang ada sangat kecil. Buruh pabrik merasa tidak tenang dan dihantui perasaan was-was, sebab kalau terlambat mereka bisa dipecat karena tidak disiplin. Belum lagi persoalan lain yang dihadapi buruh pabrik, misalnya kontrak kerja yang belum jelas berikut statusnya di pabrik, pelecehan seksual (bagi buruh pabrik perempuan) dan jumlah upah yang relatif kecil dan sebagainya. Kesemuanya itu menambah beban psikologis buruh pabrik dalam kehidupan kesehariannya.

“Embrio” pesantren buruh pabrik yang didirikan di areal perindustrian sedikit banyak mampu menetralsir persoalan-persoalan psikis yang dihadapi buruh pabrik. Rasa kecemasan masyarakat akan tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh mereka sedikit banyak tereliminir karena “embrio” pesantren keberadaannya masih dipandang oleh semua komponen masyarakat yang ada di sekelilingnya sebagai *the sacred place*, sehingga mereka malu untuk melakukan hal-hal yang negatif tersebut. Walaupun mereka masih melakukan, mereka akan melakukan di daerah yang jauh dari wilayah tersebut.

Melihat materi yang diajarkan di “embrio” pesantren buruh pabrik sebagaimana dielaborasi pada bab sebelumnya, lebih banyak mengarah pada perbaikan akhlak atau mental, di samping materi-materi yang menyangkut masalah fiqh (hukum Islam) ataupun

materi tauhid (teologi). Hal ini tentunya disadari oleh pengasuh bahwa “kesehatan” mental merupakan persoalan dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu buruh pabrik. Dengan bekal materi-materi tersebut di atas, diharapkan santri buruh pabrik siap menghadirkan sosok buruh pabrik teladan sekaligus “tahan banting” dalam menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapinya.

4. Pemecahan Masalah Moral

Selain menimbulkan persoalan-persoalan sebagaimana disebut di atas, industrialisasi memberikan dampak pula pada dekadensi moral. Pemandang secara umum berasal dari pedesaan yang masih lugu dan polos. Kehidupan desa yang penuh tata nilai menjadi landasan dalam pergaulan dan masyarakat. Kondisi tersebut, bisa jadi berubah sebaliknya. Kehidupan di kota yang individualistik diperparah dengan gaji buruh yang sangat minim dengan tuntutan-tuntutan dari keinginan buruh yang relatif berusia muda dan tuntutan pemilik modal yang terkadang berlebihan merupakan di antara penyebab terjadinya dekadensi moral di kalangan buruh pabrik.

Murahnya gaji yang diterima oleh buruh pabrik menyebabkan mereka harus menyasati sedemikian rupa agar tetap bertahan hidup di kota. Tempat kos-kosan yang penting bagi mereka adalah murah walaupun tidak *convenience*, misalnya dihuni dengan beberapa teman sefabrik. Kumpulan buruh pabrik yang relatif masih remaja dengan jumlah yang sangat besar di suatu masalah perindustrian bisa mengarah ke hal-hal negatif kalau tanpa ada yang membimbing. Mereka merasa bebas dari kungkungan nilai-nilai yang selama tinggal di desa sangat dan harus dipatuhi. Rasa ingin tahu terhadap hal-hal baru di kota, merasa tidak enak diajak teman, dan lepas atau jauh dari pengawasan menyebabkan mereka bebas melakukan apa saja. Dari sinilah timbul persoalan-persoalan moral, misalnya minum-minuman keras (mabuk-mabukan),

bermain uang (judi), mengonsumsi narkoba, dan hidup bebas dengan lawan jenis.

Kondisi ini akan bertolak belakang dengan kehidupan buruh pabrik yang tinggal di “embrio” pesantren buruh pabrik. Pengawasan yang ketat dari pengelola dalam mengawasi tingkah laku buruh pabrik baik di dalam pondok maupun di luar pondok (tempat kerja) merupakan instrumen yang cukup ampuh dalam membimbing santri buruh pabrik agar senantiasa di jalan yang benar (*on the right track*). Dalam kasus Pondok *Al-Istiqomah*, tidak jarang pengelola menunjuk “spionase” dalam mengontrol tingkah laku buruh pabrik ketika di luar pesantren. Hubungan laki-laki dan perempuan juga diatur sedemikian rupa, sehingga kasus hubungan bebas antara santri laki-laki dan perempuan tidak terjadi. Kalaupun ada kontak antara santri buruh laki-laki dengan santri buruh perempuan, kiai segera memanggil keduanya. Mereka ditanya sejauh mana keseriusan hubungan keduanya. Apabila dipandang *ba’ah* (berkelayakan, mampu), maka kiai segera mengesahkan hubungan keduanya.

Dalam kasus majelis taklim Jama’ah Tauhid, Menganti, Gresik, latar belakang pendirian majelis taklim ini adalah di samping memberi pengajaran agama di kalangan masyarakat yang masih minus, yang lebih utama dalam rangka mengatasi sekaligus mengobati buruh pabrik yang terjerumus ke dalam narkoba dan minum-minuman keras. Dalam proses penyembuhan santri yang terlibat narkoba, kiai memba’at calon santri untuk tidak terlibat lagi ke persoalan-persoalan di atas sehingga dalam beberapa bulan santri yang ikut dalam majelis taklim tersebut sudah bisa meninggalkan kebiasaan buruknya dan mereka merasakan kedamaian batin. Dari gambaran di atas, jelas bahwa keberadaan “embrio” pesantren buruh pabrik sangat dibutuhkan di areal perindustrian dalam rangka membina dan mengarahkan buruh pabrik ke arah kehidupan yang benar.

5. Pemecahan Masalah Religius

Persoalan religius merupakan masalah krusial dalam kehidupan umat manusia. Keagamaan seseorang merupakan benteng terakhir dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Namun, sejauh mana tingkat religiusitas seseorang akan tergantung sejauh mana dia memahami ajaran-ajaran agama. Dalam konteks “embrio” pesantren buruh pabrik, kaitannya dengan buruh pabrik, keadaan “embrio” pesantren buruh pabrik secara umum dilatarbelakangi oleh keprihatinan seseorang kiai atau ustadz terhadap pola kehidupan masyarakat sekitar termasuk buruh pabrik. Mereka, dalam pandangan kiai atau ustadz, sangat minim agamanya, sehingga tidak tahu mana yang harus dikerjakan dan mana yang dilarang. Adapun ketertarikan santri untuk tinggal di “embrio” pesantren buruh pabrik, setidaknya ada dua hal. *Pertama*, santri berniat untuk menuntut ilmu di pesantren. Kiai menyuruh santrinya untuk bekerja di pabrik dengan harapan santri tidak menggantungkan lagi biaya hidupnya pada orang tuanya. Di sini ditanamkan oleh kiai bahwa santri harus bisa mandiri, dan apabila ada kelebihan rezeki dari upah yang diterimanya, mereka diminta untuk menabung dan sebagian dikirim pada keluarganya. *Kedua*, santri yang memang sudah bekerja di pabrik ingin tinggal di “embrio” pesantren buruh pabrik untuk belajar ilmu agama.

Dalam aspek religius, keberadaan pesantren sangat penting sebagai pusat pembelajaran agama. Bagi masyarakat sekitar, keberadaan pesantren sangat vital dalam membekali putera-puterinya dengan agama. Meskipun, “embrio” pesantren buruh pabrik sebagian besar dihuni dan diperuntukkan untuk buruh pabrik, dalam realitasnya pesantren tidak bisa menolak keinginan masyarakat sekitar untuk belajar agama. Pada sore hari, secara umum, “embrio” pesantren buruh pabrik membuka pengajian al-Qur'an bagi anak-anak pada malam hari selepas shalat Maghrib, pengajian dikhususkan bagi bapak-bapak dan atau ibu-ibu yang

tinggal di sekitarnya. Baru setelah shalat Isya, pembelajaran bagi santri buruh pabrik dimulai sampai sekitar pukul 10 malam. Kegiatan tersebut akan dimulai lagi setelah shalat Shubuh sampai sekitar pukul 6 pagi.

Materi yang diberikan dalam proses pembelajaran berkisar pada tiga materi utama, yakni tauhid (teologi), fiqh (hukum Islam), dan akhlak. Dengan ketiga materi ini diharapkan bahwa santri buruh pabrik mengatasi persoalan-persoalan keagamaan baik di lingkungan pabrik maupun di luar. Perlu dipaparkan juga, sebagian kecil dari santri “embrio” pesantren buruh pabrik menginginkan menjadi kiai. Mereka ingin menuntaskan belajarnya dan kembali ke kampung halamannya untuk mengajar, sedang menjadi buruh pabrik hanyalah alat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya selama belajar di “embrio” pesantren buruh pabrik.

Meskipun dampak positif dari keberadaan buruh pabrik tidak diragukan, namun ada kendala-kendala kecil yang dihadapi “embrio” pesantren buruh pabrik. Buruh pabrik yang tinggal di “embrio” pesantren buruh pabrik tidak bisa tinggal lagi di pondok apabila mereka sudah menikah. Mereka tetap diizinkan mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh pondok, tetapi mereka harus tinggal di luar pondok. Selain itu, karena penerapan kerja di pabrik banyak menggunakan *shift*, banyak santri yang kebetulan berbarengan dengan *shift*-nya, terpaksa tidak bisa mengikuti pelajaran.